

ABSTRAK

Mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener (Tahap 1) di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012. Akibat hukum warga Desa Wadas tidak melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan Lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, maka proses pengadaan tanah tetap dilaksanakan di Desa Wadas. Konflik terjadi karena warga Desa Wadas dengan menghalangi petugas pelaksana pembangunan untuk melaksanakan kegiatannya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui secara jelas mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, mengidentifikasi dan menganalisis perihal terjadinya hambatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo dan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal*, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di desa Wadas Kabupaten Purworejo. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener (Tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012 dan akibat hukum warga desa Wadas tidak melakukan gugatan atas SK penetapan lokasi oleh Gubernur, maka lokasi pengadaan tanah tetap dilaksanakan di Desa Wadas meski mereka melakukan penolakan, hambatan dalam pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo yaitu penolakan Desa Wadas atas *quarry* pada lokasi pengadaan tanah Desa Wadas dan adanya *kepemilikan absentee/guntai*, serta solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah Bendungan Bener Kabupaten Purworejo antara lain mensosialisasikan makna fungsi sosial dan kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dilakukan pencabutan hak atas tanah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961.

Kata kunci : *Pengadaan tanah, hambatan, Bendungan Bener.*

ABSTRACT

The land acquisition mechanism for Bener Dam (phase 1) in Purworejo District has been implemented correctly, in accordance with Law no 2/2012. As a result of the law, residents of Wadas Village have not filed a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN) for the Decree of the Bener Dam Land Acquisition Location in Wadas Village, Purworejo District, the process of holding resilience continues to be carried out in Wadas Village. The conflict occurred because the residents of Wadas Village prevented the construction officers from carrying out their activities.

The research objective is to clearly identify the mechanism of land acquisition for Bener Dam in Wadas Village, Purworejo District, identify and analyze the occurrence of land acquisition barriers for the construction of Bener Dam in Wadas Village, Purworejo District and identify and analyze how solutions in overcoming land acquisition barriers for Bener Dam development in Wadas Village, Purworejo District.

The approach method used in this study is socio-legal, descriptive analytical research specifications, research location in the village of Wadas, Purworejo District. The data collection method uses primary data and secondary data, while the data analysis method is done qualitatively.

The results showed that the mechanism of land acquisition of Bener Dam (phase 1) in Wadas Village, Purworejo District was carried out correctly, which is in accordance with Law No. 2 of 2012 and due to the law of the residents of Wadas Village did not file a lawsuit on the Decree on the location determination by the Governor, the location of the land acquisition remained carried out in Wadas Village despite their rejection, obstacles in land acquisition in the construction of Bener Dam in Wadas Village Purworejo District namely Wadas Village's refusal of quarry at the land acquisition location of Wadas Village and ownership of absentee / guntai, and solutions to overcome obstacles in the acquisitionland of Bener Dam Purworejo District, among others, socialized the meaning of social functions and public interests that have been regulated in applicable laws and regulations and that the President would revoke land rights based on Law No. 20 of 1961.

Keywords: *Land acquisition, obstacles, Bener Dam.*